

PUSTAKA AL-KASYAF

The background of the cover features a collection of white chess pieces, including a king, queen, knight, and pawns, arranged on a wooden surface. Below the pieces, an open book with Arabic text is visible, suggesting a connection to Islamic law or scholarship. The overall color scheme is a mix of warm wood tones and deep reds/purples.

SYARIAT ISLAM, KONSTITUSI & HAM

DR. NURROHMAN, MA.

SYARI'AT ISLAM, KONSTITUSI & HAM

Penulis: DR. Nurrohman, M.A.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All Right Is reserved

Cetakan I, Agustus 2007

ISBN: 978-979-16028-15

Penyunting: Giovani Tarega, M.Ag.

Pemeriksa Aksara: Giovani Tarega, M.Ag.

Disain Sampul: Teddy Setiawan

Disain Lay Out: Teddy Setiawan

Diterbitkan oleh:

Pustaka Al-Kasyaf

Jl. Desa Cipadung No. 18 Gg. Cigagak Cibiru Bandung

Phone: (022) 70143095

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

HUBUNGAN agama dan Negara merupakan tema yang terus menghantui dunia Islam. Sejak awal sejarahnya, umat Islam sebenarnya tidak pernah memberikan respon tunggal dalam masalah ini. Kondisi semacam ini terus berlanjut sampai dunia Islam membebaskan dirinya dari kolonialisme Barat di awal abad kedupuluh. Polarisasi pandangan mereka tampak lebih jelas pada saat mereka, setelah bebas dari kolonialisme dan menyatakan diri sebagai negara merdeka, berusaha menyusun sendiri sebuah konstitusi tertulis yang akan dijadikan sebagai hukum dasar sebuah negara modern.

Di satu sisi ada tuntutan bagi negara modern yang berbasis paham kebangsaan untuk bisa melindungi hak asasi warganya tanpa membedakan suku, ras, agama atau golongan. Sementara di sisi lain mereka, sebagai bagian dari politik identitas yang ingin mereka tegaskan, berusaha memberikan tempat kepada syari'at Islam dalam struktur formal negara yang mereka bangun.

Buku ini berusaha mengungkapkan bagaimana tarik menarik antara mereka yang menginginkan syari'at Islam masuk dalam struktur formal negara dengan mereka yang ingin mengadopsi sepenuhnya hak asasi manusia yang sudah menjadi norma baru dalam pergaulan antar bangsa di dunia. Bagaimana negara-negara Muslim menempatkan syari'at Islam dalam konstitusi negaranya serta bagaimana mereka menghadapi tuntutan global tentang hak asasi manusia menjadi kajian yang menarik.

Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbanyak di dunia juga tidak bisa melepaskan diri dari problema formalisasi syari'at Islam sebagaimana yang disebut diatas. Gagasan formalisasi syari'at Islam di Indonesia sudah muncul sejak awal kemerdekaan melalui konsep Piagam Jakarta dan konsep Negara Islam. Meskipun konsep ini, setelah Indonesia merdeka, tidak pernah mendapatkan dukungan politik yang signifikan akan tetapi konsep dan gagasan ini sebenarnya tidak pernah mati sampai sekarang.

Oleh karena itu menjadi menarik pada saat Indonesia, apa pun motifnya, kemudian memberikan kewenangan kepada daerah Istimewa Aceh (sekarang disebut Naggroe Aceh Darusalam) untuk secara khusus melakukan proses formalisasi syari'at Islam di daerah ini.

Buku ini juga berusaha menggali apa sebenarnya model formalisasi syari'at Islam yang diinginkan oleh sejumlah tokoh Aceh baik yang secara terang-terangan mengusung gagasan ini maupun yang tidak mengusungnya. Setelah itu dilengkapi dengan analisis tentang implikasi-implikasi yang akan ditimbulkan akibat dari model yang dipilihnya.

Meskipun buku ini didasarkan atas hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2001 dan 2002 namun mengingat peta permasalahan yang diungkap dalam buku ini pada dasarnya belum berubah sampai sekarang, maka buku ini tetap menarik untuk dibaca bagi mereka yang ingin mendalami problematika formalisasi syari'at Islam di Aceh dan di berbagai daerah lain di Indonesia.

Sebagai lazimnya penelitian kelompok, banyak pihak yang terlibat dan memberikan kontribusi dalam proses penelitian maupun penyusunan laporannya. Kepada mereka tentu harus diberi penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya. Mereka adalah Drs. Cik Hasan Bisri, MS., Prof. Dr. Chozin Nasuha, Drs. Marzuki Wahid, MA., Hendra Ahdiyat, SH., Drs. Abdullah Syafei, MAg., Drs. Tatang Astarudin, SH. Msi, Drs. Supriyai, S.Sos., Tanpa mereka, penelitian tidak mungkin bisa diselesaikan dengan baik. Akan tetapi mengingat penggagas awal dan penanggungjawab penelitian ada pada penulis, maka semua isi yang ada dalam buku ini menjadi tanggungjawab penulis sebagai peneliti utamanya.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada pihak-pihak yang membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung pada saat penulis melakukan kegiatan di Bandung, Jakarta maupun di Aceh.

Secara khusus, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran pimpinan Pustaka al-Kasyaf yang dengan berani menerbitkan buku ilmiah yang mungkin tidak menguntungkan secara ekonomis. Mudah-mudahan jerih payah mereka mendapat imbalan pahala dari Allah SWT dan diterima sebagai amal saleh.

Akhirnya, sebagai karya manusia biasa, dan seperti pepatah tiada gading yang tak retak, dalam buku ini tentu masih bisa dijumpai kekurangan atau kekeliruan di sana-sini. Oleh karena itu kritik dan saran demi perbaikan lebih lanjut tentu akan diterima dengan senang hati.

Bandung, Akhir 2007

Nurrohman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
-----------------------------	----------

BAB 1 PENDAHULUAN	1
--------------------------------	----------

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	10
C. Kerangka Pikir	11
D. Metodologi	13

BAB 2 PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI BERBAGAI NEGARA ISLAM	17
---	-----------

A. Penyebaran Syari'at Islam di Dunia Islam	17
B. Posisi Syari'at dalam Konstitusi	22
C. Syari'at Islam, Negara Islam dan Dilema Konstitusi Indonesia.....	26
D. Hubungan antara Jaminan Konsti-tusi dan Transformasi	35
E. Ruang Lingkup Formalisasi Penerapan Syari'at Islam (Kodifikasi dan Legislasi)	38
F. Proses Formalisasi Syari'at Islam di Berbagai Negara	40
1. Sudan	40
2. Pakistan	42
3. Iran	45
4. Mesir	49

5. Libya	51
6. Indonesia	54
✓ G. Peran Ulama, Pemerintah dan Lembaga Legislatif dalam Proses Legislasi	57
H. Kedudukan dan Kekuasaan Mahkamah Syari'at	63
I. Hubungan Syari'at Islam dengan Adat atau Tradisi Setempat	66
J. Hubungan Pelaksanaan Syari'at Islam dengan Hak Asasi Manusia, Serta Problem yang Muncul	68

BAB 3 SEJARAH PERKEMBANGAN PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DI ACEH 85

A. Kecenderungan Paham Keagamaan Masyarakat Aceh dalam Fiqih dan Tasawuf dari Masa ke Masa	85
1. Sekitar Masuknya Islam di Aceh	88
2. Dinamika Faham Keagamaan di Aceh	90
3. Perkembangan Madzhab Fikih di Aceh	91
4. Perkembangan Faham Tasawuf di Aceh	95
B. Hubungan Antara Syari'at Islam dengan Adat dari Masa ke Masa	101
1. Periode Kesultanan (1507-1874 M)	102
2. Periode Kesultanan Di Bawah PenNMetrasasi Hindia Belanda dan Jepang (1874-1945 M)	104
3. Periode Setelah Kemerdekaan (1945-Sekarang)	108
✓ C. Kedudukan Ulama dalam Struktur Masyarakat Aceh	109
D. Pengadilan Agama (Mahkamah Syari'iyah): Sejarah Perkembangannya	112

E. Sejarah Perjalanan Aceh dalam Memperoleh Jaminan Hukum (Undang-Undang) bagi Penerapan Syari'at Islam Secara Luas	137
---	-----

BAB 4 MODEL PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM MENURUT PANDANGAN TOKOH ACEH	163
A. Latar Belakang Munculnya Formalisasi dan Legislasi Syari'at Islam	164
B. Arti Syari'at Islam dan Ruang Lingkupnya.	168
✓ C. Pihak-Pihak yang Memiliki Otoritas dalam Proses Formalisasi dan Legislasi Syari'at Islam	177
D. Kedudukan Mahkamah Syari'ah	192
E. Hubungan Pelaksanaan Syari'at Islam dengan Adat	198
F. Hubungan Pelaksanaan Syari'at Islam dengan Konstitusi/Sistem Hukum Nasional	206
G. Hubungan Pelaksanaan Syari'at Islam dengan Hak Asasi Manusia	213
H. Aspek-Aspek dari Syari'at Islam yang Bisa Berubah dan Tidak Bisa Berubah	229
I. Sejumlah Pandangan Kritis atas Formalisasi dan Legislasi Syari'at Islam	230
BAB 5 PENUTUP	245
A. Kesimpulan	245
B. Implikasi atas Formalisaisi dan Legislasi Syari'at serta Peluang Penelitian Lanjutan	253
DAFTAR PUSTAKA	257
TENTANG PENULIS	267

1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

WACANA formalisasi syari'at Islam kembali mengemuka ke wilayah publik. Wacana ini meski lama terdengar semenjak keruntuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998, tetapi menjadi bola polemik nasional ketika MPR hendak menggelar Sidang Tahunan pada tahun 1999. Ketika itu, sebagian kelompok umat Islam mendesakkan dicantumkan kembali tujuh kata yang pernah dicoret dari Piagam Jakarta, yakni "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya", ke dalam konstitusi Republik Indonesia. Meski gagal di tingkat nasional, tetapi perjuangan formalisasi Syari'at Islam tetap terus digalakkan di berbagai daerah melalui pencantuman ke dalam peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lain di tingkat daerah. Beberapa daerah yang menggelorakan wacana formalisasi Syari'at Islam, sekadar menyebut contoh, adalah Provinsi Aceh, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Cianjur, Kabupaten

Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut.

Untuk Aceh, tuntutan itu secara yuridis formal sudah diakomodasi dan diakui sebagai salah satu ciri keistimewaan daerah. Akomodasi itu dilakukan bukan saja oleh peraturan daerah, melainkan juga dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Meski begitu, tuntutan itu masih menghadapi problem atau kendala yang tidak ringan berkaitan dengan pola atau model syari'at Islam yang hendak diberlakukan. Sebab dalam banyak bidang hukum, seperti perkawinan, wasiat, wakaf, waris, dan ibadah, syari'at Islam sebenarnya sudah diberlakukan di Indonesia. Akan tetapi memang soal memposisikan syari'at Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam kaitannya dengan konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hingga sekarang di daerah Aceh masih problematis dan dilematis. Kemudian bagaimana cara masyarakat Aceh menghadapi kritik berkaitan dengan adanya aspek-aspek dari syari'at Islam yang dalam implementasinya akan menimbulkan masalah berkaitan dengan tuntutan penegakan hak asasi manusia atau kesulitan lain yang berkaitan dengan hukum Internasional, juga masih belum memperoleh jalan pemecahan yang baik.

Penelitian ini sengaja dilakukan untuk memperoleh rumusan model pelaksanaan syari'at Islam dan pemecahan yang tepat dalam kerangka konstitusi dan penegakan hak asasi manusia yang dewasa ini dihadapi masyarakat Aceh. Penelitian ini dilakukan atas dasar asumsi bahwa tidak semua umat Islam di

banyak masalah.

B. Tujuan Penelitian

Dari beberapa asumsi yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini secara akademis dilakukan guna mencapai tiga tujuan sebagai berikut:

1. Gambaran yang nyata tentang pelaksanaan syari'at Islam yang diterapkan di beberapa negara muslim dalam kaitan dengan konstitusi dan tuntutan penegakan hak asasi manusia. Tujuan ini dilakukan dengan cara melihat kedudukan syari'at Islam dalam konstitusi negara, ruang lingkup syari'at Islam yang diberlakukan, posisi ulama dan peran pemerintah, kedudukan *Mahkamah Syar'iyah*, jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi, serta kaitan antara syari'at Islam dengan adat atau tradisi setempat.
2. Perkembangan sejarah pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Untuk memperoleh pengetahuan ini dilakukan pengkajian tentang pelaksanaan syari'at Islam sebelum kemerdekaan Republik Indonesia dan pelaksanaan syari'at Islam setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pembahasan ini, penelitian difokuskan pada hubungan syari'at Islam dan adat, perkembangan peradilan agama (*Mahkamah Syar'iyah*) serta sejarah perjalanan Aceh dalam memperoleh jaminan hukum (undang-undang) bagi penerapan syari'at Islam secara luas.
3. Pandangan sejumlah tokoh masyarakat Aceh tentang model atau pola pelaksanaan syari'at Islam yang mereka kehendaki dalam kaitannya dengan konstitusi dan tuntutan penegakan hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini diarahkan dalam memperoleh gambaran ideal tentang model penerapan syari'at Islam menurut pandangan sejumlah tokoh

Aceh. Tujuan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai unsur seperti ruang lingkup pelaksanaan syari'at Islam yang diharapkan, posisi ulama dan peran pemerintah, kedudukan *Mahkamah Syar'iyah*, hubungan pelaksanaan syari'at Islam dengan hak asasi manusia, kaitan syari'at Islam dengan adat atau tradisi setempat, serta model konstitusi atau undang-undang yang diharapkan oleh tokoh masyarakat Aceh.

C. Kerangka Pikir

Syari'at Islam disebut eksklusif apabila dirumuskan sebagai aturan atau ketentuan Tuhan sebagaimana persis tersurat dalam al-Qur'an dan al-Hadits dengan pemahaman yang tekstual dan pelaksanaan yang ketat (*strict implementation of al-Qur'an and al-Sunna*). Ruang ijtihad dibatasi pada bagian-bagian yang belum dijelaskan oleh al-Qur'an atau al-Hadits saja. Kewenangan untuk berijtihad juga dibatasi hanya pada sejumlah orang yang betul-betul memahami syari'at Islam dan memiliki kualifikasi tertentu seperti kemampuan berbahasa Arab dan sejenisnya.

Tidak semua orang diperbolehkan menafsirkan aturan atau ketentuan al-Qur'an dan al-Hadits. Hanya mereka yang berkualifikasi sebagai *mujtahid* saja yang boleh berijtihad, itu pun dibatasi pada hal-hal yang bukan *qath'iy al-wurud wa al-dilalah*. *Fuqaha* atau *mujtahid* diberi otoritas untuk menafsirkan syari'at Islam karena mereka dianggap memiliki kemampuan untuk memahami maksud atau kehendak Tuhan. Sebagai hukum Tuhan, syari'at Islam cenderung dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan tidak berubah. Syari'at Islam juga ditempatkan dalam posisi yang *par excellence*, di atas undang-undang apapun buatan manusia.

Untuk menjamin bahwa undang undang buatan manusia

tidak menyimpang dari syari'at Islam, dibentuk dewan pengawas dari pakar syari'at Islam (*faqih*) yang bertindak selaku wakil Tuhan dan pengawal syari'at Islam. Karena itu, syari'at Islam dalam pandangan eksklusif cenderung tidak mengakui kedaulatan rakyat atau paham demokrasi, sebaliknya mengakui adanya kedaulatan Tuhan (teokrasi) sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam menghadapi kemungkinan pertentangan antara tuntutan syari'at Islam dengan tuntutan konstitusi, hak asasi manusia, dan hukum internasional, kelompok eksklusif lebih memilih berpegang teguh pada syari'at Islam ketimbang harus menyesuaikan dengan tuntutan "dari luar".

Berbeda dengan pandangan syari'at Islam inklusif, sepanjang prinsipnya yang fundamental telah diakomodasi, ketentuan syari'at Islam bisa diubah dan disesuaikan dengan kondisi sosial tertentu, apalagi untuk memenuhi tuntutan demokrasi, hak asasi manusia, dan hukum internasional yang sudah menjadi kesepakatan bangsa-bangsa. Ini dapat dilakukan karena syari'at Islam dipahami sebagai aturan yang dirumuskan dari prinsip-prinsipnya yang fundamental.

Tidak ada atau sedikit sekali aturan syari'at Islam yang dinilai sebagai *qath'iy al-wur'ud wa al-dilalah*. Hampir semua aspek dari syari'at Islam bisa dijadikan lapangan ijtihad. Ijtihad, terutama yang berkaitan dengan hukum publik, bisa dilakukan oleh siapa saja, bukan monopoli *fugahá'*. Semua orang pada dasarnya diperbolehkan ikut serta dalam pembuatan aturan hukum yang menyangkut kepentingan publik.

Oleh karena dalam urusan publik, apa yang baik menurut rakyat dianggap baik menurut Tuhan. Pemahaman syari'at Islam inklusif, dengan begitu, tentu tidak mengalami kesulitan untuk mengadopsi paham demokrasi, kedaulatan rakyat, dan hak asasi manusia ke dalam substansi syari'at Islam. *Fugahá'*

yang bertindak selaku pengawal syari'at dan wakil Tuhan di bumi tidak diperlukan lagi. Dengan kata lain, posisi *wilāyat al-faqīh* (kedaulatan Tuhan) digantikan dengan *wilāyat al-ra'yyah* (kedaulatan rakyat).

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan sekaligus, yakni pendekatan teologis, sosiologis, dan antropologis. Pendekatan teologis digunakan untuk menemukan pemahaman tokoh terhadap pola penerapan syari'at Islam. Pendekatan ini digunakan karena pemahaman seseorang tentang pola pelaksanaan syari'at Islam tidak bisa dipisahkan dari pandangan teologisnya. Orang yang dari sisi teologis memiliki pandangan rasional atau liberal tentu cenderung memiliki pandangan syari'at Islam yang substansialis dan inklusif. Sebaliknya, orang yang memiliki pandangan teologinya cenderung tradisional dan konservatif, maka pandangan syari'at Islamnya cenderung eksklusif dan literalis. Sedangkan untuk melihat kecenderungan orang banyak dalam memilih pola pelaksanaan syari'at Islam digunakan pendekatan sosiologis. Adapun upaya penulis untuk mengungkap secara mendalam latar belakang budaya serta motif-motif di balik pandangan yang ditampilkan oleh seseorang digunakan pendekatan antropologis.

Agar lebih jelas dan fokus, penulis membatasi syari'at Islam yang diteliti adalah syari'at Islam yang berkaitan dengan urusan publik atau hukum publik (*public law*). Adapun syari'at Islam yang berkaitan dengan hukum *privat* atau *family law* diteliti sejauh hal itu memiliki relevansi dengan konstitusi dan hak asasi manusia atau karena sudah menjadi bagian dari hukum positif. Sedangkan konstitusi yang dimaksud adalah konstitusionalisme

atau paham konstitusi yang pada prinsipnya mengadopsi paham demokrasi dan kedaulatan rakyat, persamaan warga negara di hadapan hukum, serta pembagian atau pemisahan kekuasaan. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak untuk berekspresi atau berpendapat, hak untuk berkumpul atau berserikat, hak bebas memilih agama, dan hak-hak lain yang tercantum dalam naskah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diakui oleh dunia internasional.

Tokoh yang dijadikan sumber data dari penelitian ini adalah wakil masyarakat Aceh yang duduk di parlemen, baik di DPR maupun MPR, tokoh masyarakat Aceh yang ada di Jakarta dan Bandung, anggota DPRD Provinsi Aceh, ulama, akademisi, tokoh LSM, tokoh perempuan, tokoh non-muslim, hakim Pengadilan Agama, dan pejabat pemerintah daerah Provinsi Aceh.

Pemilihan tokoh yang diwawancarai diawali dengan tokoh yang jelas-jelas mendukung dilaksanakannya syari'at Islam di Provinsi Aceh. Oleh karenanya, tokoh Aceh di DPR maupun MPR yang mewakili Partai Persatuan Pembangunan, penulis prioritaskan mengingat partai ini termasuk pihak yang semangat memperjuangkan adanya jaminan konstitusi dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh melalui amandemen UUD 1945. Selanjutnya, wawancara dilakukan dengan sistem *snowball* atas dasar petunjuk atau saran dari orang yang pertama diwawancarai.

Sesuai dengan judul dan masalah yang diteliti, responden dalam *field research* pada awalnya dibatasi pada mereka yang mendukung dilaksanakannya syari'at Islam dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun dalam perkembangan di lapangan, penulis mewawancarai juga pihak yang jelas-jelas menuntut kemerdekaan, yakni Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pertimbangannya keberadaan GAM di Aceh

memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam perkembangan pelaksanaan Syari'at Islam ke depan, karena itu menjadi penting untuk dimintai pandangan-pandangannya berkaitan dengan pokok masalah penelitian ini.

Sampel yang diambil ditentukan secara *purposif*. Angket dalam penelitian ini tidak digunakan, tetapi penulis mempersiapkan panduan wawancara secara tertulis guna menuntun dan mengendalikan wawancara agar tepat pada pokok masalah yang telah ditetapkan. Data-data lain, sepanjang menyangkut *library research* dilakukan melalui *book survey*, yakni data yang berkaitan dengan pelaksanaan syari'at Islam di negara-negara Islam, sejarah penerapan syari'at Islam di Aceh, sejarah *Mahkamah Syar'iyah*, hubungan syari'at Islam dengan adat di Aceh, dan kondisi sosial politik dan budaya Aceh dewasa ini.

Daerah utama penelitian adalah Jakarta, Bandung, dan Aceh. Untuk daerah lain dikunjungi sepanjang memiliki *urgensi* tinggi, seperti dalam penelusuran dan pencarian literatur pendukung atau karena di daerah itu terdapat tokoh Aceh.

2 | PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI BERBAGAI NEGARA ISLAM

A. Penyebaran Syari'at Islam di Dunia Islam

DEWASA ini penyebaran syari'at Islam bersamaan dengan tersebarnya umat Islam di berbagai kawasan. Khusus di Asia dan Afrika, meliputi beberapa negara di sembilan kawasan: (1) Asia Tenggara; (2) Asia Selatan; (3) Asia; (4) Timur Tengah; (5) Afrika Barat; (6) Afrika Utara; (7) Tanduk Afrika; (8) Afrika Tengah dan Timur; dan (9) Afrika Selatan. ([http://www. soas. ac. uk/centres/islamiclaw/html](http://www.soas.ac.uk/centres/islamiclaw/html)). Dilihat dari sudut masyarakat tempat syari'at Islam itu menyebar maka masyarakat itu bisa dibagi menjadi empat.

Pertama, dalam masyarakat bangsa yang secara resmi menyatakan diri sebagai negara Islam (*Islamic states*), seperti Brunei Darussalam, Pakistan, Arab Saudi, Iran, dan Maroko

(*Muslim Sovereign State*). Brunei Darussalam, merupakan suatu kerajaan kecil namun kaya dengan sumberdaya alam (minyak bumi); sedangkan syari'at Islam yang dijadikan tuntunan kehidupan bermasyarakat *madzhab Syafi'i*. Pakistan, merupakan suatu negara republik model Eropa Barat; sedangkan syari'at Islam yang dijadikan tuntunan kehidupan bermasyarakat *madzhab Hanafi*. Arab Saudi, merupakan suatu kerajaan (*mamlakah*) yang didominasi oleh keluarga Sa'ud; sedangkan syari'at Islam yang dijadikan tuntunan kehidupan bermasyarakat *bermadzhab Hanbali*. Iran, merupakan suatu negara republik; sedangkan syari'at Islam yang dijadikan tuntunan kehidupan bermasyarakat *madzhab Syi'ah Ja'fari*, yang dianut oleh sekitar 93% warganya. Maroko, merupakan suatu kerajaan; sedangkan syari'at Islam yang dijadikan tuntunan kehidupan bermasyarakat *madzhab Maliki*.

Kedua, dalam masyarakat bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam tetapi tidak menyatakan dirinya sebagai negara Islam, dengan corak syari'at Islam yang majemuk, misalnya, Indonesia (sunni), Irak (32% sunni dan 65% syi'i), dan Mesir (sunni). Dalam tipe masyarakat bangsa ini, umat Islam pernah menjadi kekuatan politik yang dominan. Oleh karena itu, upaya untuk menjadikan syari'at Islam, sebagai nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dilakukan melalui berbagai saluran, *infrastruktur* maupun *suprastruktur* politik. Di Indonesia, misalnya, rumusan Piagam Jakarta dan perdebatan tentang dasar negara dalam *konstituante* pasca pemilihan umum tahun 1955, merupakan bukti sejarah tentang usaha tersebut. Dewasa ini, satuan masyarakat bangsa tipe ini diidentifikasi sebagai negeri Muslim (*Muslim countries*). Kedudukan agama Islam dalam konstitusi negara yang bersangkutan sangat bervariasi Di Mesir (pasal 2),

Islam sebagai agama negara dan sumber dasar legislasi adalah hukum Islam (*Islamic Jurisprudence*). Di Irak (pasal 4), Islam sebagai agama negara. Di Indonesia (pasal 29), negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tanpa mengatur kedudukan agama. Di Turki (pasal 2), menganut negara sekuler tanpa diskriminasi agama.

Ketiga, dalam masyarakat bangsa yang mayoritas penduduknya beragama lain, tetapi berupaya untuk menerapkan syari'at Islam sebagai kaidah sosial dalam kehidupan mereka, seperti umat Islam *Patani* di Muangthai dan Moro di Pilipina. Gerakan pemisahan diri dari satuan masyarakat bangsa, bahkan ikatan negara, merupakan upaya mengembalikan jati diri sebagai satuan masyarakat yang kohesif, dengan corak syari'at Islam yang homogen, setelah mengalami intervensi oleh satuan masyarakat mayoritas (Budha di Muangthai dan Katholik di Pilipina).

Keempat, dalam masyarakat bangsa, dalam suatu ikatan negara sekuler, yang mayoritas penduduknya menganut agama lain. Sementara itu, umat Islam terpilah dalam kelompok kecil (jamaah), yang didasarkan pada kesamaan etnis dan aliran pemikiran Islam (corak ajaran), sehingga cenderung eksklusif. Hal itu merupakan suatu gejala baru, terutama di benua Amerika dan Eropa, seperti di Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris. Satuan masyarakat tersebut, dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, sehingga proporsinya semakin besar.

Negara-negara Islam tidak sama dalam memposisikan syariat Islam. Ada yang menjadikan syari'at Islam sebagai sumber utama program legislasi nasional (eksplisit dan implisit): Bahrein (pasal 2), Bangladesh (pasal 8), Iran (*Preamble*), Maroko (*Preamble*), Mauritania (*Preamble*), Mesir (pasal 2), Kuwait (pasal 2), Oman

Tamyîz, dan *Majlis al-Qadhâ' al-A'lâ*, di samping *al-Mahkamah al-Tijâriyah*.

Berbicara tentang penyebaran syari'at Islam tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang penyebaran fiqh atau pemikiran fuqaha yang bersifat normatif. Tidak hanya di Indonesia, produk pemikiran fuqaha yang bersifat normatif itu disebarluaskan melalui kitab-kitab fikih dan disosialisasikan dalam bentuk pengajaran dan ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan (*takhrîj al-ahkâm alâ al-nâsh al-qânûn*). Di Indonesia sosialisasi dalam bentuk pengajaran dilakukan melalui pesantren dan perguruan tinggi agama Islam, sedangkan transformasi hukum dilakukan melalui produk kekuasaan negara, terutama untuk memenuhi kebutuhan hukum material dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan, dan hukum formal (hukum acara).

B. Posisi Syari'at dalam Konstitusi

Sebagaimana dijelaskan dimuka bahwa masing-masing negara Islam berbeda dalam memposisikan syari'at Islam. Untuk mengetahui bagaimana persisnya posisi syari'at Islam dalam masing-masing negara bisa dilihat dari konstitusinya. Bila dilihat dari sejauh mana suatu konstitusi memberikan perlindungan terhadap agama dan syari'at Islam, konstitusi negara-negara muslim dapat dibagi menjadi enam katagori dengan cara melihat kombinasinya dalam menempatkan agama dan syari'at Islam.

- 1). Negara yang menjadikan syari'at (al-Qur'an & hadits) sebagai konstitusi contohnya Saudi Arabia. Pasal 1 Konstitusi Saudi Arabia menyatakan: *The Kingdom of Saudi Arabia is a sovereign Arab Islamic state with Islam as its religion, God's Book and the Sunnah of His Prophet, God's prayers and peace be*